

ABSTRAK

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK RI ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Melania Martha Yutanti

NIM: 182114013

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

2022

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa (1) peran inspektorat dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. (2) sumber daya organisasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran inspektorat. Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya catatan dari BPK RI terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan dan keterbatasan SDM pada OPD khususnya SDM yang bertugas menyusun LK OPD. Sehingga memerlukan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai OPD yang salah satunya mempunyai tugas untuk menjamin kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Narasumber penelitian yaitu inspektur daerah, inspektur pembantu bidang pemerintahan desa, dan kepala bidang akuntansi BKAD. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran inspektorat dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas pemeriksaan LKPD tahun 2020 meliputi audit dengan tujuan tertentu, reviu LKPD, reviu RAB BTT terkait Pandemi Covid-19, evaluasi percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan oleh inspektorat daerah, asistensi penyusunan LK OPD, asistensi penyusunan pertanggungjawaban APBDes, asistensi penatausahaan aset dan persediaan, konsultasi, monitoring opname persediaan, monitoring kas opname, dan pendampingan pada saat pemeriksaan LKPD oleh BPK RI. Peran inspektorat perlu didukung kecukupan sumber daya organisasi, kondisi sumber daya organisasi saat ini relatif cukup kecuali SDM karena kekurangan auditor. Untuk itu beberapa upaya penambahan SDM telah dilakukan, di samping itu agar peran inspektorat tetap optimal maka dilakukan penyusunan PKPT berbasis risiko. Dengan demikian semakin intensif peran inspektorat dalam melaksanakan program pengawasan yang ditujukan untuk mempertahankan opini WTP yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, maka akan menjamin opini WTP dapat dipertahankan.

Kata kunci: Inspektorat, WTP, BPK

ABSTRACT

THE ROLE ANALYSIS OF REGIONAL INSPECTORATE TO MAINTAIN UNQUALIFIED OPINION FROM BPK RI IN INSPECTION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT
A case study at Gunungkidul Regency Government

Melania Martha Yutanti

NIM: 182114013

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

2022

This research aims to describe and analyze (1) the role of inspectorate in maintain an unqualified opinion (WTP) from BPK RI in inspection of local government financial statement (LKPD) in 2020. (2) the organizational resources needed to optimalize the role of the inspectorate. The background of the research is the records from BPK RI related to the findings of the inspection result and limited human resources in OPD, especially human resources in charge of preparing LK OPD. Therefore it requires the role of the Regional Inspectorate of Gunungkidul regency as the organization ensuring the performance of regional financial management.

This research is case study. The data collection techniques used are interviews and documentation. The interviewees of the research are done to Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa, and the head of Bidang Akuntansi BKAD Gunungkidul Regency. The analysis technique used is descriptive qualitative.

The result of the research shows that the role of Regional Inspectorate of Gunungkidul Regency in maintaining the WTP opinion from BPK RI in LKPD inspection 2020 including audit with specific objectives, LKPD review, RAB BTT reviews related to the Pandemic Covid-19, evaluation of accelerated follow up on reccomendations from BPK RI, monitoring of the follow up results supervision by the regional inspectorate, assistance in the preparation of LK OPD, assistance in the preparation of APBDes accountability, assistance in asset and inventory administration, consultation, stock opname monitoring, cash opname monitoring, and accompanying in LKPD inspection by BPK RI. The role of the inspectorate needs to be supported by adequate organization resources, and the current condition of organizational resources is relative sufficient except for human resources due to a shortage of auditors. For this reason, several efforts to increase human resources have been carried out, in addition to maintaining the optimal role of inspectorate, the preparation of a risk based PKPT is carried out. Thus, the more intensive the role of the inspectorate in implementing the monitoring program aimed at maintaining the opinion of the WTP which is adjusted to the available resources is, the more it will ensure that the opinion of the WTP can be maintained.

Keywords: Inspectorate, WTP, BPK